

**ANALISIS MANAJEMEN KOMUNIKASI DALAM PEMBENTUKAN KOMISI
INFORMASI PROVINSI RIAU DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU**

Oleh :

ANNISA RAHMAWATI

0901120289

annisameita91@gmail.com

Pembimbing :

NOVA YOHANA, S.Sos, M.I.Kom

yohana_nova@yahoo.com

Jurusan Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) FISIP UR

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan dalam suatu negara, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi. Maka dalam hal ini terdapat badan khusus yang mengelola keterbukaan informasi publik, yaitu lembaga mandiri yang disebut Komisi Informasi (KI). Riau termasuk provinsi yang terlambat dalam membentuk Komisi Informasi. Sehingga dibutuhkan penatakelolaan yang baik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau selaku pihak pelaksana. Dalam hal ini perlu adanya manajemen komunikasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses manajemen komunikasi dalam pembentukan Komisi Informasi di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 17 orang yaitu 8 orang dari pihak pelaksana, 6 orang dari Komisi Informasi Provinsi Riau dan 3 orang dari tim seleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan pengamatan partisipasi. Pada teknis analisa data menggunakan model interaktif serta analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dan pengecekan anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen komunikasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau telah mencapai target melalui tahap perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, dan pelaksanaan yang baik karena pola komunikasi yang terbuka. Dalam hal ini, komunikasi yang terbuka dan transparan merupakan langkah dalam pengawasan dari semua pihak yang terlibat, dan secara tidak langsung masyarakat turut mengawasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sedangkan untuk evaluasi telah sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota.

Kata Kunci : Manajemen, Komunikasi, Komisi, Informasi Publik

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMMUNICATION MANAGEMENT THE FORMATION COMMISSION INFORMATION RIAU PROVINCE IN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING RIAU PROVINCE

Public disclosure is required in a country, so that people can follow developments and changes that occur. So in this case there is a specialized agency that manages public disclosure, the independent agency called the Commission on Information (KI). Including Riau province late in shaping the Information Commission. So that good governance required by the Department of Communications Information Technology and Electronic Data Processing Riau Province as the executor. In this case the need for communication management to determine the level of success in achieving objectives and targets. This study aims to identify and understand the process of communication management in the establishment of Information Commission in Riau Province. This study used qualitative research methods. The selection of informants was purposive sampling based on the number of informants as many as 17 people are 8 people from the executor, 6 of the Commission on Information Riau Province 3 of the selection team. Techniques of data collection using interviews, documentation and observation participation. On the technical analysis of the data using interactive models and descriptive analysis. This study uses data validity checking techniques which includes the extension of participation, persistence observation, triangulation and member checking. These results indicate that communication management the formation Commission Information Riau Province has reached the target through the stages of planning, organizing clear, and good practice for open communication patterns. In this case, open and transparent communication is a step in the control of all parties involved, and indirectly oversee the performance of the Department of Communications Information Technology and Electronic Data Processing Riau province, while for evaluation in accordance with the Decision of the Chairman of the Central Information Commission of the Republic of Indonesia on Guidelines for Selection and Determination of members of Provincial Information Commission and Information Commission District / City.

Keywords : Management, Communication, the Commission, the Public Information

Pendahuluan

Informasi Publik merupakan informasi yang wajib diumumkan dan disebarluaskan karena untuk memperoleh informasi tersebut adalah hak setiap orang. Demi mewujudkan suatu transparansi negara Indonesia perlu adanya undang-undang yang menjamin hak setiap warga negaranya, dengan berasaskan negara yang demokratis. Sehingga dibentuknya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam mengelola keterbukaan informasi publik tersebut diperlukan suatu lembaga mandiri yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanat Undang-undang yang telah dibentuk, yaitu

Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan /atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota jika dibutuhkan. Dalam hal ini, Riau termasuk provinsi yang terlambat dalam pembentukan Komisi Informasi. Penatakelolaan Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan, sehingga pada pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. Pada proses penatakelolaan ini dibutuhkan manajemen komunikasi yang baik dalam menentukan tingkat keberhasilan organisasi/ instansi tersebut mencapai target dan sasaran, manajemen komunikasi akan mengarahkan cara dan pola komunikasi kepada orang-orang yang berada di dalam organisasi (internal) dan orang-orang yang memungkinkan akan terlibat dalam aktivitas organisasi (eksternal).

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Menurut Schramm dalam (Suranto, 2005 : 14) mengatakan komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima, dengan bantuan pesan pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003: 8). Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut G.R. Terry, manajemen adalah: “*management is distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources* (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya)”.(dalam Hasibuan, 2005:2). Manajemen didefinisikan sebagai proses karena dalam mencapai tujuan menggunakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Fungsi-fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh manajer dalam kegiatan komunikasi organisasi yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling).

Manajemen komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola informasi untuk mencapai tujuan (Tommy Suprpto, 2009: 144). Setiap aktivitas pendistribusian pesan dan atau informasi adalah aktivitas komunikasi. Guna mencapai tingkatan keberhasilan dalam aktivitas komunikasi yang meliputi aktivitas pencarian, pengumpulan, dan pengolahan serta pendistribusian informasi selalu memerlukan manajemen. Melalui fungsi-fungsi manajemen, pesan atau informasi ditata dan diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang dikemas dalam rentangan berbagai kegiatan komunikasi untuk mencapai sasaran. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa manajemen komunikasi adalah manajemen yang diterapkan dalam

kegiatan komunikasi. Ini berarti manajemen akan berperan atau sebagai penggerak aktivitas komunikasi dalam usaha pencapaian tujuan komunikasi.

Proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau merupakan kegiatan dalam menyeleksi individu-individu yang berkompeten. Calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau terdiri atas dua unsur yaitu unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau melibatkan banyak pihak, tidak hanya lingkungan internal tetapi juga mencakup lingkungan eksternal seperti Pemerintah Daerah, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, lembaga/ organisasi masyarakat, akademik, redaksi media cetak dan elektronik serta masyarakat luas. Sehingga untuk menjalin suatu hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat perlu adanya manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau ditinjau dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) komunikasi dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain penelitian yang menjadi arahan bagi penulis adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Patilima, 2005: 9) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No 460. Objek dari penelitian ini adalah analisis manajemen komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman No 460, Pekanbaru-Riau. Pemilihan Informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* dengan pertimbangan seorang informan kaya informasi sehingga dapat digali lebih dalam, informan berjumlah 17 orang yang terdiri dari 8 orang dari Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, 6 orang dari Komisi Informasi Provinsi Riau dan 3 orang narasumber ahli dari tim seleksi. Langkah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan, wawancara, dokumentasi dan pengamatan partisipasi. Analisa data menurut Patton (dalam Moleong 2002: 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran yaitu membedakan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Berdasarkan pengertian analisa diatas maka operasionalnya data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diuraikan secara sistematis dengan berpedoman kepada landasan teori yang

berhubungan dengan pembahasan untuk mencari pemecahan masalah. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran secara detail dari komunikasi, manajemen dan manajemen komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau

Perencanaan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau. Perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan dan prosedur, pembuatan rencana serta ramalan (prediksi) yang diperkirakan akan terjadi. Schermerhorn, Jr (dalam Suprpto, 2009: 131) mengatakan perencanaan merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Lewat perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi hasil cara-cara untuk mencapainya. Pokok utama dalam perencanaan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah musyawarah untuk mempersiapkan anggaran dari pemerintah daerah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Junaidi, M.Sc (Kepala Seksi Informasi Publik), bahwasannya :

“Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan data Elektronik Provinsi Riau khususnya Bidang Informasi Publik dan fokusnya pada bidang saya yakni Kepala Seksi Informasi Publik sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau, untuk persiapan pertama yang dilakukan adalah melakukan konsultasi langsung ke Komisi Informasi Pusat yang berlokasi di Jakarta, namun jauh sebelum itu hal yang paling utama dilakukan adalah mengajukan anggaran kepada pihak Baperda dan DPRD, yang disetujui pada bulan Oktober 2012 untuk dana anggaran pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau”.(Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Junaidi, M.Sc sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Mei 2013).

Penggunaan dana ini pun akan disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012. Selain itu perencanaan untuk setiap tahap dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau ini telah dikemukakan dalam *Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Nomor : 01/ KEP/ KIP/ III/ 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/ KEP/ KIP/ X/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota*, yang menjadi acuan dan pedoman untuk teknis pelaksanaannya.

Pengorganisasian Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. George R. Terry (dalam Hasibuan, 2003: 20), *Organizing is the esthablishing of effective behavioural relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfaction for the purpose pf achieving some goal are objective.* (Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakukan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Pengorganisasian dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau, sudah terbentuk dan terstruktur dengan jelas sesuai Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Riau untuk membentuk panitia yang terdiri dari 2 tim yaitu tim seleksi dan tim fasilitasi. Dalam hal ini, untuk tim fasilitasi diberikan wewenang kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, pembuatan SK untuk tim seleksi ini dilakukan pada tanggal 9 s/d 12 Oktober 2012. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Syah Harroffie, SH, MH Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, bahwasannya :

“Untuk tim fasilitasi intern dari dinas komunikasi informatika (diskominfo), sehingga pembagian kerja untuk tim fasilitasi dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) yang saya buat dan berdasarkan usulan dari Bidang Informasi Publik itu sendiri untuk menunjuk siapa-siapa yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta melihat ketersediaan anggarannya”.(Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Syah Harroffie, SH, MH Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 30 Mei 2013).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau memiliki wewenang sepenuhnya sebagai fasilitasi. Namun dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang dan Seksi Informasi Publik ditunjuk sebagai pelaksana dalam memfasilitasi kegiatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau.

Pelaksanaan dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

Pada tahap pelaksanaan dalam proses manajemen komunikasi suatu organisasi baik itu instansi (nir laba) maupun perusahaan (laba), memiliki 2 unsur penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu komunikasi dan motivasi. Menurut peneliti, komunikasi memiliki peran yang sangat besar, karena dengan adanya komunikasi yang berkesinambungan dapat membentuk suatu keakraban dan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu secara tidak langsung komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dapat mengawasi tindakan

setiap kegiatan pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau ini akan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

Tahap pertama dalam pelaksanaan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah tahap seleksi administrasi yaitu menyeleksi berkas-berkas calon pendaftar Komisi Informasi Provinsi Riau yang masuk sesuai syarat umum dan khusus yang telah ditentukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ir. Junaidi, M.Sc, sebagai berikut :

“Dari 33 berkas pendaftar masuk dari unsur masyarakat, 32 berkas diproses, 1 berkas tidak diproses karena tidak melalui stempel pos, dari 32 berkas yang diproses tersebut hanya 18 berkas calon peserta yang memenuhi persyaratan dan akan diseleksi lagi melalui test berikutnya, sedangkan dari unsur pemerintah ditunjuk oleh Gubernur Riau sebanyak tiga (3) orang, sehingga untuk unsur pemerintah tidak melalui seleksi administrasi dan tertulis. Proses seleksi administrasi ini dilakukan pada tanggal 1 & 2 November 2012, untuk hasil diumumkan melalui media massa (surat kabar), elektronik (TV lokal, web site dan radio), dan papan pengumuman sedangkan untuk konfirmasi bagi peserta yang lulus akan dihubungi via telpon (pesan singkat)”.(Hasil wawancara dengan bapak Ir. Junaidi, M.Sc sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Mei 2013).

Tahap kedua dalam proses penyeleksian pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah ujian tertulis, dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012 di Hotel Premiere Pekanbaru, seleksi ujian tertulis berjumlah 18 orang peserta, dan dari 18 orang peserta tersebut hanya 7 orang yang lulus ujian tertulis dari unsur masyarakat. Hasil ujian tertulis ini diumumkan pada tanggal 14 November 2012. Selain itu, tim fasilitasi sebagai pihak pelaksana juga mengkonfirmasi secara langsung kepada masing-masing peserta via telpon (melalui pesan singkat), untuk informasi hasil dan tahap test selanjutnya. (berdasarkan observasi dan keikutsertaan peneliti).

Tahap ketiga adalah penerimaan aduan masyarakat/ uji publik terkait kualitas masing-masing peserta. Pada tahap ini 3 orang dari unsur pemerintah digabungkan dengan 7 orang dari unsur masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk lebih mengenal dan mengetahui karakter masing-masing peserta, menyaring dan menerima masukan terhadap 10 peserta calon Komisi Informasi Provinsi Riau. Uji publik ini dilakukan melalui email dan pesan singkat dengan salah satu no.telp tim fasilitasi. Selain melalui email dan telpon kegiatan uji publik juga ditayangkan melalui televisi lokal seperti RTV yang menayangkan nama-nama calon Komisi Informasi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan mutu nilai masing-masing peserta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Said Dailani Yahya, S.Pd.i yaitu:

“Uji publik ditayangkan di televisi selama 8 hari, dengan mencantumkan 10 nama peserta calon Komisi Informasi untuk menanyakan kepada masyarakat siapakah dari nama-nama yang tercantum tersebut patut dan layak untuk diangkat menjadi Komisi Informasi Provinsi Riau”. (Hasil wawancara dengan Bapak Said Dailani Yahya, S.Pd,I sebagai anggota Komisi Informasi yang terpilih dan saat ini menjabat dibidang Edukasi, Sosialisasi, Advokasi, 6 Mei 2013).

Sesuai dengan pernyataan diatas, bahwasannya untuk pelaksanaan uji publik ini dilakukan dari tanggal 14 sampai dengan 21 November 2012. Semua pendapat dan kritikan yang masuk akan menjadi pertimbangan oleh tim seleksi yang akan diserahkan kepada DPRD

Tahap ke empat adalah penulisan makalah atau karya tulis, dalam hal ini peserta dituntut untuk mengembangkan suatu tema yang akan dijadikan sebagai karya tulis yang bermanfaat, selain itu dalam karya tulis ini peserta calon Komisi Informasi Provinsi Riau harus memiliki wawasan yang luas dan konsep pemikiran yang maju, sehingga dapat menambah poin terhadap penilaian selanjutnya. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Hotel Premiere Pekanbaru.

Tahap ke lima adalah Test Dinamika Kelompok dan Psikotes yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2012 di Hotel Grand Central Pekanbaru. Untuk psikotes, tim penguji yang diundang salah satu dosen psikolog UIN (Universitas Islam Negeri). Kendala yang dialami pada tahap ini dirasakan oleh beberapa peserta calon Komisi Informasi, salah satunya Bapak Said Dailani Yahya, S.Pd.i, mengatakan :

“Pada saat psikotes, menurut saya psikiaternya hanya melihat dari sudut pandang kelimuan psikiaternya saja, namun tidak melihat dan tidak berpijak pada landasan Komisi Informasi itu sendiri, sehingga psikiater tersebut sepertinya kurang memahami konteks dan kesesuaian pertanyaan, sehingga harus dijelaskan pula terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Said Dailani Yahya, S.Pd.i sebagai peserta calon anggota Komisi Informasi yang terpilih dan saat ini menjabat dibidang Edukasi, Sosialisasi, Advokasi, 2 Mei 2013).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya ketidak sesuaian pemahaman antara peserta seleksi Komisi Informasi dengan tim penguji, menurut peneliti kurangnya pemahaman ini dikarenakan kurangnya komunikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan penjelasan dan uraian terkait pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya disesuaikan dengan pokok masalah.

Tahap ke enam adalah wawancara pada tanggal 24 November 2012 di Hotel Grand Central. Sepuluh (10) calon Komisi Informasi akan di wawancara/ interview terkait dengan Komisi Informasi dan undang-undangnya, serta beberapa pertanyaan yang akan menguji pengetahuan dari masing-masing peserta. Pada tanggal 26 November tim fasilitasi bersama tim seleksi mengadakan rapat untuk penetapan rekapitulasi hasil akhir calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau di Ruang Rapat Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. (berdasarkan observasi dan dokumentasi). Pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2012 pihak pelaksana mengajukan surat usulan nama-nama ke Gubernur Riau. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ir. Junaidi, M.Sc, sebagai berikut :

“Setelah surat usulan nama-nama disetujui oleh Gubernur Riau, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan surat ke DPRD untuk dapat melaksanakan fit and propertest bagi 10 calon Komisi Informasi Provinsi Riau, pengurusan surat ini pada tanggal 3 Desember 2012”. (Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Junaidi, M.Sc, 1 Mei 2013).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa cepat dan aktifnya pihak pelaksana dalam mempersiapkan segala tahap demi tahap yang harus disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan, hanya saja hal-hal yang tidak terduga mungkin saja terjadi seperti pihak yang diundang tidak berkesempatan hadir pada tanggal yang telah ditentukan sehingga adanya kemungkinan untuk mengundur kegiatan tersebut demi menyesuaikan jadwal para undangan.

Pada tanggal 5 Desember 2012, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau mengadakan dialog interaktif sekaligus uji publik untuk 10 peserta yang dipublikasikan melalui studio RRI Pekanbaru, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan informasi dari masyarakat tentang kapasitas masing-masing calon Komisi Informasi, sekaligus untuk mensosialisasikan pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

Tahap terakhir untuk pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau ini adalah tahap Fit and Propertest yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 14 Desember 2012. Tahap inilah yang sangat menentukan para peserta dapat terpilih dan gugur, karena pada dasarnya test dari tertulis hingga wawancara merupakan langkah utama untuk dapat masuk ke tahap fit and propertest ini. Sehingga hasil dari fit and propertest sangat menentukan pemilihan Komisioner. Peserta calon Komisi Informasi yang berjumlah sepuluh (10) orang ini diserahkan kepada DPRD melalui Gubernur, berdasarkan surat keputusan tim seleksi yang berisikan permintaan kepada Gubernur menyampaikan dan melampirkan hasil dan nilai (dari ujian tertulis sampai uji publik) para peserta kepada DPRD (Komisi A) untuk dilakukan Fit and Properties (Uji Kelayakan dan Kelayakan terhadap 10 orang calon Komisi Informasi) sebagai bahan pertimbangan oleh DPRD.

Pengawasan dan Evaluasi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam Pembentukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau

Pengawasan dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau dilakukan pada setiap tahap, pengawasan pada tahap perencanaan, pengorganisasian hingga pelaksanaannya. Pengawasan dalam penggunaan dana anggaran melalui Nota Pencairan Dana atas persetujuan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. Selain itu, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) akan menjadi bukti fisik yang dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, dan akan di pertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk jadwal kegiatan telah sesuai target. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Taslim (Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, bahwasannya :

“Untuk setiap pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kinerja yang cukup efisien dalam mencapai target terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Riau. Sepengetahuan saya setiap kegiatan dan tahapnya selalu dilaksanakan dengan tepat waktu, dan selalu ada informasi serta konfirmasi kepada pihak yang terlibat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Taslim, mantan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, 2 Mei 2013).

Sedangkan proses evaluasi untuk kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, diamati dan dinilai oleh tim seleksi yang selalu berkomunikasi dan bekerja sama selama proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si, seperti berikut :

“Semua kegiatan dalam pembentukan Komisi Informasi ini sudah teragenda, sehingga untuk prosesnya bisa dikatakan lancar dan pada hakikatnya tidak ada masalah, karena untuk persiapannya pun kami bekerja sampai malam untuk rapat dan dinas komunikasi informatika (diskominfo) selalu terlibat dalam mempersiapkan teknisnya, kapan pengumuman, menyesuaikan syarat-syarat yang diumumkan berdasarkan undang-undang, batasan waktu, siapa yang menerima berkasnya dan siapa yang mengujinya, dan semua itu difasilitasi dengan baik oleh dinas komunikasi informatika (diskominfo)”.(Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si selaku anggota tim seleksi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau, 30 Mei 2013).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa selaku anggota tim seleksi merasa puas akan kinerja dari Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan data Elektronik Provinsi Riau, dalam hal memfasilitasi semua kebutuhan terkait kegiatan dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau. Sedangkan evaluasi setelah terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Riau dilihat berdasarkan surat *Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Nomor : 01/ KEP/ KIP/ III/ 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/ KEP/ KIP/ X/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota*. Tahap-tahap dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah tercantum dalam Surat Keputusan diatas, sehingga pengawasan dari pelaksanaan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau ini dapat diarahkan.

Analisis Manajemen Komunikasi dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

Manajemen berasal dari kata *manage* dan dalam bahasa Latin *manus*, yang berarti memimpin, mengatur atau membimbing. George R. Terry mendefinisikan manajemen tersebut merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Tommy Suprpto, 2009: 130).

Analisis manajemen dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau, dengan adanya standar kerja atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), memudahkan pihak manajerial dalam mengelola aktivitas yang akan dilakukan melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan. Proses manajemen dari perencanaan yang sudah sangat jelas akan menentukan tahap fungsi manajemen selanjutnya yakni pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sumber daya manusia yang berkompeten dan berpengalaman akan sangat memudahkan kinerja dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau, selain itu sarana

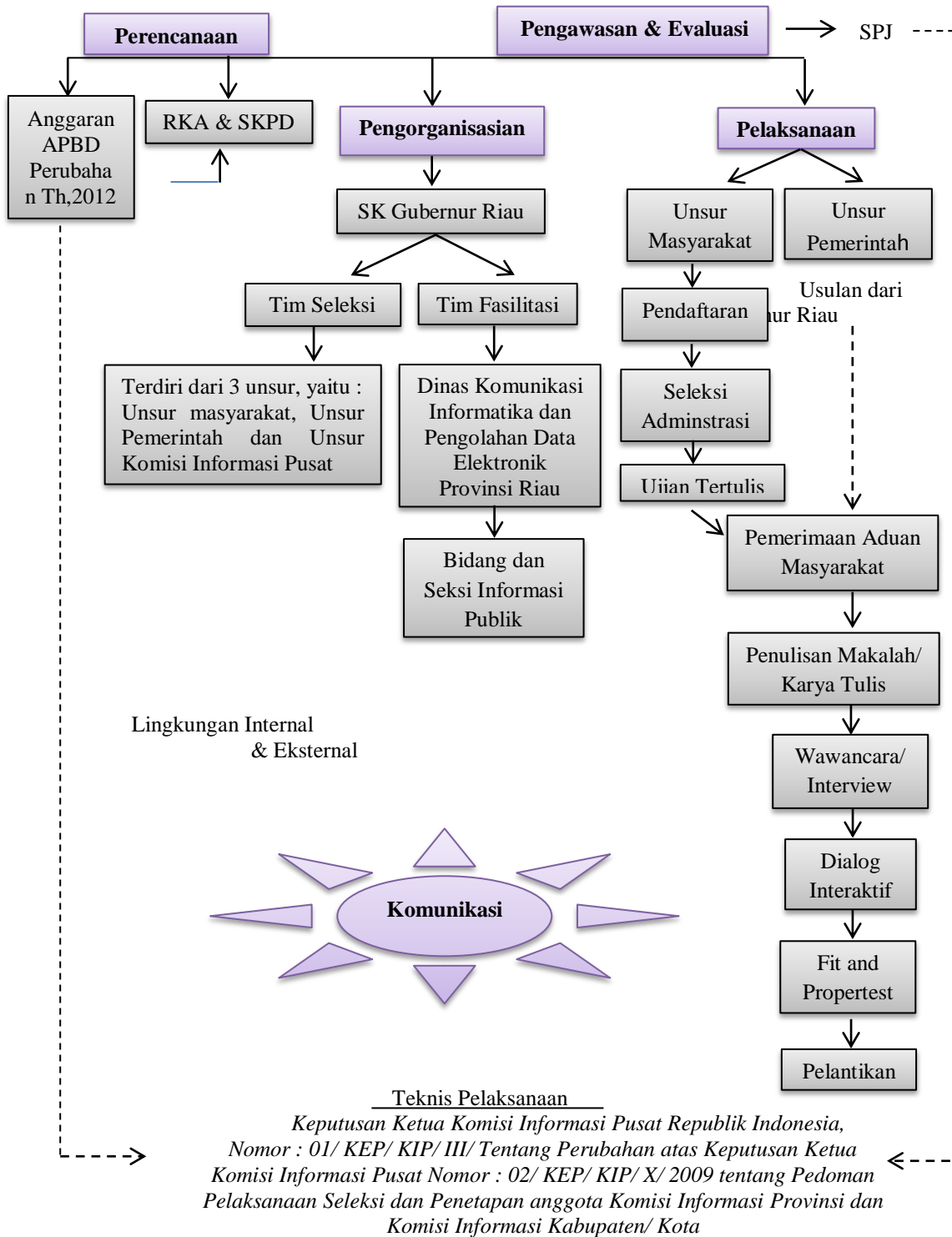
dan prasarana yang tersedia juga sangat mendukung karena adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan juga media massa. Proses pelaksanaan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau merupakan suatu kegiatan dalam manajemen komunikasi, karena hal utama yang dilakukan dalam setiap tahap mengelola kegiatan tersebut adalah komunikasi.

Manajemen komunikasi dipahami sebagai proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi pengertian/ pemahaman antara satu individu maupun lebih yang bertujuan mencapai keinginan dan kepuasan bersama. Pada bagian ini, pendekatan sistem dalam manajemen komunikasi merupakan salah satu alternatif yang digunakan organisasi untuk menjaga agar aktivitas manajemen dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Sehingga dalam hal ini, analisis manajemen komunikasi dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau melekat pada pandangan sistem di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. Sistem ini merupakan siklus hidup dan pola komunikasi dari instansi tersebut, bila salah satu sub sistem tidak berfungsi maka sistem pun akan terhambat. Pada sistem pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau sangat diperlukan suatu feedback atau umpan balik, yang akan menentukan proses kelancaran dan berjalannya sistem dengan baik.

Menurut peneliti suatu organisasi/ instansi merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan bergantung satu lain sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sistem akan menghubungkan semua lingkungannya baik itu lingkungan internal maupun eksternal, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut harus adanya tata kelola yang baik dalam setiap hubungan dan interaksi, dalam hal ini manajemen sangat diperlukan agar dapat mencapai tahap demi tahap target dan sasaran yang telah dibentuk. Suatu hubungan dan interaksi tersebut akan terbentuk melalui komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki peranan penting sebagai penggerak aktivitas dalam proses manajemen. Dengan kata lain, suatu organisasi/ instansi harus memiliki pola manajemen komunikasi yang baik, komunikasi dalam tahap perencanaannya, komunikasi dalam tahap pengorganisasiannya, komunikasi dalam tahap pelaksanaannya, dan komunikasi dalam tahap pengawasan dan evaluasinya.

Dari pembahasan diatas dapat digambarkan dalam bentuk bagan, sebagai berikut:

Gambar 1. Manajemen Komunikasi dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.



Sumber : Hasil olahan peneliti

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan serta penjelasan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan menyesuaikan beberapa saran sebagai penutup laporan penelitian ini:

Perencanaan Komunikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah dana anggaran, dalam hal ini dana yang akan digunakan merupakan dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Perencanaan dalam penggunaan dana anggaran ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

Pengorganisasian manajemen komunikasi dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah membentuk panitia pelaksana sesuai dengan keputusan Gubernur Riau. Panitia terdiri dari dua (2) tim yaitu tim seleksi yang terdiri dari 3 unsur (unsur masyarakat, pemerintah dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia) dan tim fasilitasi yang diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. Sehingga dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau juga harus membentuk dan menata suatu tim sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.

Pelaksanaan dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sebagai tim fasilitasi dan pemegang dana anggaran harus memberikan layanan dalam memenuhi kebutuhan tim seleksi dan para peserta calon Komisi Informasi. Dalam Pelaksanaannya, komunikasi yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau selama proses pembentukan Komisi informasi Provinsi Riau merupakan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan ruang lingkup yang cukup luas, hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau yang selalu mengkoordinasikan, mengkonfirmasi dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pengawasan dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi dilakukan melalui kebijakan dan ketentuan yang telah berlaku. Dalam penggunaan anggaran, pihak pelaksana mengkoordinasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana anggaran, dengan membuat Nota Pencairan Dana. Penggunaan dana anggaran tersebut dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau melalui Surat Pertanggung jawaban (SPJ) setiap bulannya.

Saran

- Sebaiknya Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau khususnya Bidang Informasi Publik menambah beberapa personil untuk kerja yang lebih optimal.
- Penulis mengharapkan hendaknya penelitian Analisis Manajemen Komunikasi dalam pembentukan Komisi Informasi Pusat di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau ini dapat dikembangkan dan diperkaya pembahasan dengan menggunakan metode penelitian yang lain serta konsep yang berada di lapangan sehingga ilmu komunikasi dan informasi semakin berkembang.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis Manajemen Komunikasi dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau (Studi Kasus di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terlihat eksistensinya tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dengan ketulusan, keikhlasan. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UR), Ibu Dosen pembimbing yang dengan sabar telah berkenan memberikan arahan, sumbang pemikiran, koreksi, serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, serta seluruh jajaran pimpinan beserta staf Komisi Informasi Provinsi Riau, dan untuk kedua orangtua dan saudara-saudara penulis penulis yang tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin M. Tatang. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan kesepuluh, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- AW, Suranto, 2005, *Komunikasi Perkantoran; Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran*, Cetakan I. Depok, Yogyakarta; Media Wacana.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen*, BPFE, jogyakarta.
- Hasibuan. *Dasar-dasar manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- _____. *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*, Cetakan 11, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Patilima, Hamid. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Soedarsono, Dewi K, 2009, *Sistem Manajemen Komunikasi (teori, model dan aplikasinya)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Suprpto, Tommy, 2009, *Pengantar Ilmu Komunikasi (dan peran manajemen dalam komunikasi)*. Yogyakarta: CAPS
- Yasir, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cetakan Pertama, CV. Witra Irzani, Pekanbaru, 2009.